

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karo dalam Pilkada tahun 2015 berhasil mendorong peningkatan partisipasi masyarakat, khususnya dalam membangun kesadaran politik dan keterlibatan warga dalam proses demokrasi lokal. Strategi yang dirancang secara kontekstual dan adaptif menunjukkan bahwa KPU mampu membaca karakteristik sosial dan geografis masyarakat Kabupaten Karo sebagai dasar penyusunan pendekatan komunikasi politik yang relevan.

Dari keseluruhan strategi yang digunakan, pendekatan kampanye konvensional menjadi strategi yang paling berdampak tinggi. Komunikasi langsung melalui metode door to door memberikan ruang dialog antara KPU (melalui relawan demokrasi) dan masyarakat secara personal. Strategi ini efektif dalam mengatasi apatisme politik, membangun rasa percaya, dan menyampaikan informasi secara jelas serta kontekstual. Begitu pula dengan pelibatan tokoh adat dan tokoh agama yang mampu menjembatani pesan KPU ke masyarakat melalui otoritas simbolik yang kuat. Kedekatan sosial dan legitimasi tokoh lokal menjadikan pesan partisipasi lebih mudah diterima, khususnya di komunitas tradisional dan kelompok usia lanjut.

Selanjutnya, media visual seperti baliho dan leaflet memberikan pengaruh sedang, berperan sebagai pengingat pasif yang menandai keberlangsungan tahapan pemilu. Media ini memiliki fungsi simbolik di ruang publik, namun keterbatasannya terletak pada sifatnya yang satu arah dan kurang interaktif.

Efektivitas media visual sangat tergantung pada kombinasi dengan komunikasi langsung. Dalam konteks masyarakat dengan tingkat literasi bervariasi, gambar dan slogan tidak selalu cukup untuk menggerakkan partisipasi tanpa pendampingan penjelasan verbal.

Sementara itu, strategi kampanye digital menghasilkan dampak yang cenderung rendah, terutama karena keterbatasan akses internet di sejumlah wilayah, kurangnya pelatihan teknis, serta belum optimalnya desain konten komunikasi digital. Strategi ini baru menjangkau segmen terbatas seperti pemilih muda di kawasan perkotaan yang aktif di media sosial. Selain itu, absennya interaksi dua arah dalam banyak konten membuat pesan-pesan KPU di ruang digital tidak selalu mampu membangun keterlibatan yang kuat.

Dari keseluruhan temuan, dapat ditegaskan bahwa permasalahan utama dalam meningkatkan partisipasi pemilih bukan hanya terletak pada penyampaian informasi, tetapi lebih dalam lagi menyangkut tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu, rendahnya literasi politik, keterbatasan sarana komunikasi, serta keragaman budaya lokal yang membutuhkan pendekatan spesifik. Strategi yang bersifat seragam dan formal tidak cukup efektif di hadapan kompleksitas realitas sosial yang dihadapi.

Secara logis, penulis menyimpulkan bahwa keberhasilan strategi KPU Kabupaten Karo ditentukan oleh sejauh mana strategi tersebut mampu menyesuaikan diri dengan karakteristik masyarakat lokal. Strategi tidak bisa dipandang sebagai langkah teknis semata, melainkan sebagai proses sosial yang membutuhkan kepekaan, kedekatan, dan pengakuan terhadap struktur budaya setempat. Dalam kerangka teori Chandler, strategi yang efektif adalah yang mampu

menyeimbangkan tujuan jangka panjang, arah tindakan yang adaptif, serta alokasi sumber daya yang tepat. Penyesuaian strategi terhadap kondisi lokal, baik dari sisi sosial maupun geografis, menjadi kunci dalam membangun partisipasi politik yang berkelanjutan dan bermakna.

## **5.2 Saran**

### **5.2.1 Saran Praktis**

1. KPU Kabupaten Karo perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi sosialisasi yang telah diterapkan guna mengidentifikasi metode yang paling efektif dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar bagi KPU dan Bawaslu dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis data dalam penyelenggaraan pemilu.
2. KPU dapat mengoptimalkan peran relawan demokrasi dengan pendekatan yang lebih berbasis komunitas, khususnya bagi kelompok pemilih dengan tingkat partisipasi rendah. Pemerintah juga perlu memberikan dukungan kebijakan berupa regulasi yang memperkuat program relawan demokrasi sebagai bagian dari strategi sosialisasi pemilu yang berkelanjutan.
3. KPU dan Bawaslu dapat lebih mengoptimalkan kolaborasi dengan organisasi masyarakat, institusi pendidikan, serta media lokal untuk memperluas jangkauan informasi pemilu. Pemerintah dapat mendukung inisiatif ini dengan kebijakan yang mendorong keterlibatan multisektor dalam pendidikan politik dan sosialisasi pemilu.
4. KPU perlu menyelenggarakan program edukasi politik yang lebih sistematis dan berkelanjutan, terutama di sekolah-sekolah dan komunitas lokal, guna

membangun kesadaran politik sejak dini. Pemerintah dapat mendukung upaya ini dengan kebijakan yang mengintegrasikan pendidikan politik dalam kurikulum sekolah serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan demokrasi.

5. KPU perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan aksesibilitas pemilih, baik melalui perbaikan infrastruktur maupun inovasi dalam metode pemungutan suara yang lebih inklusif. Regulasi yang mendukung penggunaan teknologi pemilu, seperti e-voting atau layanan pemungutan suara berbasis digital, dapat menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan partisipasi pemilih di daerah terpencil.

### **5.2.2 Saran Teoritis**

1. Penelitian ini berkontribusi dalam kajian ilmu politik dengan memperdalam pemahaman mengenai efektivitas strategi sosialisasi pemilu yang diterapkan oleh KPU di Kabupaten Karo. Studi ini juga menyoroti bagaimana peran lembaga penyelenggara pemilu dalam memperkuat demokrasi partisipatif di tingkat lokal. Kajian lebih lanjut dapat dilakukan dengan membandingkan efektivitas strategi ini di daerah dengan karakteristik politik dan demografi yang berbeda.
2. Hasil penelitian menegaskan pentingnya sosialisasi dan pendidikan politik dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemilu. Kontribusi penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dalam merancang strategi komunikasi politik yang lebih efektif. Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi bagaimana faktor psikologis dan sosial

ekonomi memengaruhi keputusan individu dalam berpartisipasi dalam pemilu.

3. Studi ini membuka peluang untuk meneliti efektivitas metode sosialisasi KPU di daerah dengan tingkat literasi politik yang lebih rendah. Selain itu, dampak persaingan politik terhadap keberhasilan strategi sosialisasi pemilu juga menjadi aspek menarik untuk dikaji guna memahami dinamika elektoral yang lebih kompleks.
4. Dengan semakin berkembangnya penggunaan media sosial dan teknologi digital, penelitian ini memberikan wawasan mengenai hubungan antara strategi KPU dan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pemilu. Studi ini juga dapat menjadi dasar untuk membandingkan strategi KPU di berbagai daerah guna menemukan pendekatan yang paling optimal dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Penelitian lanjutan dapat menelaah bagaimana algoritma media sosial memengaruhi pola keterlibatan pemilih dalam diskursus politik serta efektivitas kampanye digital dibandingkan dengan metode konvensional.